

Yosephus Mainake

Analisis Legislatif Ahli Muda

yosephus.mainake@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Meksiko saat ini tengah mengajukan rancangan undang-undang untuk menaikkan tarif bea masuk impor (BMI) hingga 50 persen, dari yang sebelumnya rata-rata sekitar 20 persen. Kebijakan ini terutama ditujukan untuk membatasi masuknya produk asal Tiongkok yang banyak menggunakan Meksiko sebagai jalur transit menuju Amerika Serikat (AS). Namun, negara-negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko, seperti Korea Selatan, India, Rusia, Thailand, dan Indonesia juga berpotensi ikut terdampak. Kebijakan ini akan berdampak pada 8,6 persen dari total impor Meksiko dengan tingkat tarif yang bervariasi pada berbagai sektor termasuk tekstil, baja, dan otomotif. Kebijakan baru ini diperkirakan akan memengaruhi impor senilai sekitar US\$52 miliar. Menteri Ekonomi Meksiko, Marcelo Ebrard, menegaskan bahwa kenaikan tarif ini akan diterapkan hingga batas maksimum yang diperbolehkan oleh aturan World Trade Organization (WTO). Pemerintah Meksiko menyatakan bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk melindungi sekitar 325.000 lapangan kerja strategis serta menciptakan lapangan kerja baru melalui penguatan industri dalam negeri.

Berdasarkan data Trademap, ekspor Indonesia ke Meksiko sejak periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Nilai total ekspor meningkat dari sekitar US\$936 juta pada tahun 2020 menjadi US\$2,25 miliar pada tahun 2024. Namun, kontribusi Indonesia terhadap total impor Meksiko masih tergolong kecil, yakni hanya sekitar 0,36 persen dari total impor Meksiko sebesar US\$625 miliar pada 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhannya kuat, pangsa pasar Indonesia masih terbatas dan sangat potensial untuk diperluas. Sektor kendaraan bermotor menjadi penyumbang ekspor terbesar Indonesia ke Meksiko. Nilainya melonjak dari US\$197 juta pada 2020 menjadi US\$672 juta pada 2023, sedikit menurun menjadi US\$597 juta pada 2024. Namun, sektor ini juga paling berisiko terdampak langsung jika Meksiko menaikkan tarif impornya. Kenaikan tarif akan menyebabkan harga produk otomotif Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk dari negara mitra dagang Meksiko seperti AS, Uni Eropa, atau negara-negara di kawasan Amerika Latin yang tergabung dalam perjanjian seperti United States Mexico Canada Agreement (USMCA) atau Pacific Alliance.

Selain sektor kendaraan bermotor, sektor peralatan listrik dan elektronik juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, meningkat dari US\$94 juta pada 2020 menjadi US\$337 juta pada 2024. Meskipun potensi pasarnya cukup besar, produk sektor ini juga rentan terhadap penyesuaian tarif maupun hambatan teknis perdagangan (TBT), mengingat sifat industrinya yang sangat kompetitif dan sensitif terhadap perubahan harga. Di sisi lain, sektor alas kaki menunjukkan kinerja ekspor yang solid dengan nilai mencapai US\$219 juta pada 2024, dan Indonesia berhasil menguasai hampir 10 persen pangsa pasar alas kaki di Meksiko. Namun, sektor ini cukup rentan terhadap perubahan tarif karena industri alas kaki domestik Meksiko memiliki basis produksi yang kuat, sehingga potensi proteksionisme dalam bentuk tarif bisa muncul untuk melindungi produsen lokal.

Sektor besi dan baja juga mengalami pertumbuhan pesat, dengan nilai ekspor yang meningkat dari US\$5,5 juta pada 2020 menjadi US\$150 juta pada 2024. Meski nilainya belum sebesar sektor lain, besi dan baja termasuk industri strategis dan sensitif di banyak negara, sehingga berpotensi terdampak oleh kenaikan tarif atau kuota sebagai bentuk perlindungan bagi industri baja dalam negeri Meksiko. Sementara itu, sektor minyak nabati dan lemak hewani, khususnya minyak sawit (CPO), menunjukkan kenaikan ekspor dari US\$50 juta menjadi US\$135 juta dalam periode yang sama. Meski tidak langsung terdampak oleh tarif impor konvensional, produk ini rentan terhadap hambatan non tarif seperti regulasi lingkungan, pelabelan, dan sertifikasi keberlanjutan, yang berpotensi menjadi bentuk proteksi dagang terselubung.

Kebijakan tarif impor Meksiko ini menjadi tantangan bagi Indonesia, mengingat Indonesia tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko. Produk-produk utama ekspor Indonesia yang berpotensi dikenai tarif baru akan menghadapi penurunan daya saing yang signifikan di pasar Meksiko. Akibatnya, volume ekspor Indonesia ke Meksiko dapat menurun, dan para eksportir berisiko mengalami kerugian pendapatan. Dengan demikian, jika kebijakan tarif ini diterapkan, surplus perdagangan Indonesia dengan Meksiko berpotensi tergerus karena melemahnya posisi produk Indonesia di pasar tersebut.

Atensi DPR

Kebijakan tarif impor baru yang diumumkan Pemerintah Meksiko pada 2025 menjadi cermin menguatnya tren proteksionisme global. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok membuat hambatan dagang kian meningkat, menambah ketidakpastian, dan sering kali mengganggu rantai pasok dunia. Bagi Indonesia, kebijakan ini patut jadi peringatan. Meski bukan sasaran utama, Indonesia tetap terdampak karena tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko, sehingga produk ekspor seperti kendaraan, sepatu, baja, dan elektronik berisiko kehilangan daya saing. Untuk mengatasi hal ini, Komisi VI DPR RI dalam fungsi pengawasannya perlu mendorong pemerintah untuk sigap mengambil langkah antisipatif, salah satunya melalui penguatan diplomasi dagang dengan Meksiko. Di sisi lain, setiap kebijakan perdagangan luar negeri harus dibarengi dengan penguatan industri domestik agar manfaatnya terasa nyata. Dengan pengawasan yang strategis dan terintegrasi, Komisi VI bukan hanya memastikan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kemandirian ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian iklim perdagangan global.

Sumber

Kompas, 12 September 2025;
kontan.co.id, 11 September 2025;
trademap.org, 14 September 2025;
wartaekonomi.co.id, 11 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*